

## PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL KECAMATAN BANJARAN, KABUPATEN BANDUNG

**Nandang Mulyana, Risna R Sesnawaty, Detri Yulianti Lestari**  
Fakultas Ilmu Sosioal dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

**Abstrak.** Ekonomi lokal saat ini menjadi isu utama dalam pengembangan masyarakat. Ekonomi lokal mencul karena adanya tetntutan setiap masyarakat yang dikembangkan berdasarkan potensi yang dimilikinya. Pengembangan ekonomi local berdasarkan potensi yang dimilikinya pada suatu saat akan menjadikan produk yang dikembangkan menjadi produk unggulan didaerah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Adapun pendekatan kualitaif digunakan adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan secara lebih mendalam dari informan. Sementara data yang digunakan lebih banyak adalah data sekunder yang telah diolah tetapi tidak menutup kemungkinan menggunakan data primer dari informan yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Banjaran mempunyai potensi ubi jalar yang dapat diolah menjadi produk unggulan dar daerah tersebut. Berdasarkan analisis heksagonal semua aspek telah ada di Kecamatan Banjaran walau belum maksimal dan adanya berbagai hambatan.

### PENDAHULUAN

Kabupaten Bandung adalah salah satu kabupten yang ada di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi sebagai daerah pertanian. Di Kabupaten Bandung berdasarkan data dari Dinas Pertanian, lahan perkebunan ada sekitar 27.490 Ha. Lahan tegal/kebun yang ada di Kabupaten Bandung tersebut merupakan lahan terluas ketiga setelah lahan irigasi atau pertanian dan lahan lainnya seperti kolam, empang, hutan negara, dan lain-lain. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa di Kabuupaten Bandung masih dapat dikembangkan ekonomi berdasarkan lahan yang tersedia tersebut.

Lahan yang ada di Kabupaten Bandung digunakan untuk ditanami berbagai macam tanaman, salah satunya ubi jalar. Kabupaten Bandung sebagai salah satu penghasil ubi jalar di Provinsi Jawa Barat. Data berikut yang menunjukkan komoditas ubi jalar di Kabupaten Bandung:

**Tabel 1. Data uraian komoditi ubi di Kabupaten Bandung**

No	Uraian Komoditi	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015
1	<b>Ubi Kayu</b>					
	Luas Tanam (ha)	6.674	6.483	6.886	5.952	5.171
	Luas panen (ha)	7.565	6.159	6.506	6.893	5.185
	Produksi (ton)	144.990	118.013	124.960	127.846	109.091
	Produktivitas (ku/ha)	191,66	110,65	192,07	185,47	210,40
2	<b>Ubi Jalar</b>					
	Luas Tanam (ha)	1.965	2.140	1.777	2.494	1.476
	Luas panen (ha)	2.618	2.033	1.686	2.545	1.449
	Produksi (ton)	37.692	26.501	22.267	29.009	19.853
	Produktivitas (ku/ha)	143,97	130,35	132,07	113,98	137,01

Sumber: Profil Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung 2015

Berdasarkan data diatas terlihat secara produksi dan lahan yang ditanami komoditas ubi jalar mengalami penurunan. Akan tetapi secara produktivitas setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan secara produktivitas komoditas ubi jalar di Kabupaten Bandung setiap tahun meningkat. Dengan lahan yang semakin berkurang tetapi secara produksi ubi jalar dari Kabupaten Bandung relative tetapi setiap tahunnya. Berdasarkan data tersebut, komoditas yang dihasilkan per tahun terbanyak ditempati oleh ubi kayu yang pada tahun 2015 produktivitasnya mencapai 109.091 ton. Kemudian produksi ubi jalar di Kabupaten Bandung berdasarkan kecamatan yang ada menunjukkan data sebagai berikut :

**Tabel 2. Data daerah penghasil komoditas ubi jalar dan ubi kayu di Kabupaten Bandung**

Komoditas	Daerah penghasil	Komoditas	Daerah penghasil
UBI JALAR	Arjasari	UBI KAYU	Nagreg
	Banjaran		Arjasari
	Cicalengka		Cicalengka
	Cikancung		Cicalengka
	Baleendah		Baleendah
	Pacet		Cimencyan
	Ibun		Cilengkrang
	Ciwidey		

Sumber: Profil Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung 2015

Data di atas menunjukkan, bahwa Kecamatan Banjaran sendiri merupakan penghasil ubi jalar yang utama di Kabupaten Bandung. Penghasil ubi jalar di Kabupaten Bandung diarahkan pada wilayah Bandung selatan. Sementara itu daerah utara Kabupaten Bandung lebih banyak sebagai penghasil ubi kayu. Dengan demikian Kabupaten Bandung sudah menerapkan wilayah dengan penghasil komoditas tertentu.

Kecamatan Banjaran sebagai salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung juga mempunyai potensi lahn yang baik. Lahan pertanian yang berupa sawah seluas 1.303 Ha, dan lahan pertanian bukan sawah seluas 1.534 Ha. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa di Kecamatan Banjaran luas lahan pertanian bukan pertanian lebih luas dibandingkan dengan lahan pertanian sawah. Lahan pertanian bukan sawah atau tegal/kebun pada umumnya ditanami palawija, hortikultura dan tanaman obat.

Komoditas ubi yang berkembang di Kecamatan Banjaran tidak saja diproduksi mentah saja, akan tetapi juga diolah menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Salah satu produk ubi yang mempunyai ekonomis tinggi yaitu produksi opak dari ubi. Produsen opak dari ubi di Kecamatan Banjaran sudah ada enam produksen. Keenam produsen tersebut berada dalam satu kampung yakni Ciparingga di Desa Sindang panon, namun berbeda wilayah RT. Opak dari ubi tersebut sudah menjadi makanan khas dari daerah Banjaran. Tempat produksi yang dahulu sempat terkenal bukanlah Ciparingga namun Pasir Gede meski keduanya berada di Desa yang sama, yaitu Desa Sindang Panon.

Pengolahan produk opak dari ubi ini masih dapat dikembangkan karena melimpahnya produksi ubi di Kecamatan Banjaran. Perlu adanya keterlibatan semua pihak dalam mengembangkan produksi opak dari ubi ini, termasuk mengembangkan masyarakat itu sendiri. Salah satu profesi dalam pengembangan masyarakat adalah pekerjaan sosial. Profesi pekerjaan sosial memiliki beberapa metode yang salah satunya, yaitu pengembangan masyarakat. Metode ini dapat dipakai untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produksi komoditas ubi kayu di Kec. Banjaran, Kab. Bandung dapat menjadi salah satu potensi dalam melakukan pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

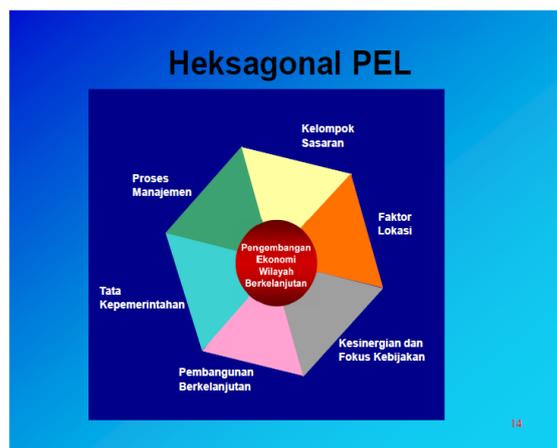
## Tinjauan Konseptual

### a. Pengembangan Ekonomi Lokal

Setiap masyarakat mempunyai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pengembangan ekonomi berdasarkan potensi setempat dikenal dengan pengembangan ekonomi local. Indratno & Agustina (2005) me-nyatakan bahwa pengembangan ekonomi lokal merupakan salah satu langkah dalam pengentasan kemiskinan. Sementara Blakely & Bradshaw (2002) melihat pengembangan ekonomi lokal sebagai proses yang mana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, pengembangan ekonomi lokal adalah sebuah proses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pengentasan kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Tujuan pengembangan ekonomi lokal adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dan berkelanjutan serta kesempatan kerja penuh melalui meningkatnya kegiatan investasi di daerah. Dendi & Mahman (2007) mengatakan bahwa pendekatan pengembangan ekonomi lokal yang digunakan sangat tergantung kepada potensi, peluang dan persoalan yang dihadapi daerah. Dengan demikian, pengembangan ekonomi lokal memerlukan kerjasama berbagai pihak atau *stakeholder* yang berada di suatu daerah.

International Labour Organization (ILO) menyebutkan pengembangan ekonomi lokal adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu, yang memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum, dengan menggunakan sumber daya lokal dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi. Pencapaian tujuan tersebut melibatkan banyak aspek, berikut aspek-aspek yang perlu diketahui dalam pengembangan ekonomi lokal atau sering disebut dengan heksagonal pengembangan ekonomi lokal.



Gambar 1. Heksagonal Pengembangan Ekonomi Lokal

Sumber: web unair 2016

Kelompok Sasaran berisikan investir luar, pelaku usaha lokal dan pelaku usaha baru. Kemudian, faktor lokasi mulai dari faktor lokasi yang terukur, tidak terukur untuk dunia usaha hingga tidak terukur untuk individu. Keterkaitan atau kesinergian dan kebijakan mencakup perluasan ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan wilayah. Pembangunan berkelanjutan berada dalam 3 bidang yang berkaitan satu sama lain, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Tata pemerintahan mencakup kemitraan pemerintah dan dunia usaha, reformasi sektor publik dan pengembangan organisasi. Terakhir, proses manajemen mencakup diagnosa partisipatif, perencanaan dan implementasi secara partisipatif, dan monev secara partisipatif.

### b. Pemberdayaan Masyarakat

Profesi pekerjaan sosial merupakan profesi yang memiliki beberapa metode yang dipakai di dalamnya. Salah metode pekerjaan sosial adalah metode *Community Organizing/Community Development*. Metode tersebut sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "Pengembangan atau Pemberdayaan Masyarakat". Menurut Wibawa (2010) asal konsep pengembangan masyarakat (terjemahan dari *Community Development*) sebenarnya adalah pengorganisasian masyarakat (*Community Orgaization*) dan inti pengertiannya adalah mendorong warga masyarakat untuk mengorganisasikan diri untuk melaksanakan kegiatan guna mencapai kesejahteraannya sendiri. Menurut Edi Suharto, setidaknya terdapat 4 peran yang sangat relevan diketahui oleh para pekerja sosial yang akan melakukan pengembangan masyarakat. Keempat peran tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Fasilitator

Dalam literatur pekerjaan sosial peranan "fasilitator" sering disebut sebagai "enabler". Keduanya bahkan sering dipertukarkan satu sama lain. Peran ini bertujuan untuk membantu klien agar menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional.

## 2. **Broker**

Peranan broker pada prinsipnya adalah menghubungkan klien dengan barang-barang dan jasa dan mengontrol kualitas barang dan jasa tersebut. Ada tiga kunci dalam pelaksanaan peran broker yaitu, menghubungkan (*linking*), barang dan jasa (*goods and services*) dan pengontrolan kualitas (*quality control*).

## 3. **Mediator**

Pekerja sosial berperan sebagai “fungsi kekuatan ketiga” untuk menjembatani antara anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya.

## 4. **Pembela (Advokat)**

Peran pembelaan dapat dibagi dua: advokasi kasus (*cases advocacy*) dan advokasi kelas (*class advocacy*). Apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seorang klien secara individual maka pekerja sosial tersebut berperan sebagai pembela kasus. Pembelaan kelas terjadi manakala klien yang dibela pekerja sosial bukanlah individu melainkan sekelompok anggota masyarakat.

Sementara, Zastrow (1999 :14-15) menyampaikan beberapa peran pekerja sosial secara umum. Berkaitan dengan praktek pekerjaan sosial dalam pengembangan sosial masyarakat, maka beberapa peran tersebut yang sesuai antara lain :

### i. **Pemungkin (*enabler*).**

Sebagai pemungkin, pekerja sosial membantu sasaran dalam menyampaikan kebutuhannya, menilai dan mengenali masalahnya, menggali strategi untuk penyelesaian masalah, memilih dan mengaplikasikan strategi yang sesuai, dan mengembangkan kapasitas yang dimilikinya yang sesuai dengan permasalahannya secara efektif.

### ii. **Perantara (*broker*).**

Sebagai perantara, pekerja sosial membantu sasaran dalam menghubungkan dengan sumber-sumber pelayanan yang tersedia, yang sesuai dengan kebutuhan sasaran.

### iii. **Tenaga ahli (*expert*).**

Sebagai tenaga ahli, pekerja sosial memberikan bantuan teknis yang berupa saran atau nasehat tentang cara pemecahan masalah yang dihadapi.

### iv. **Perencana sosial (*social planner*).**

Sebagai perencana sosial, pekerja sosial melakukan upaya-upaya penyusunan rencana untuk memenuhi kebutuhan mengatasi masalah.

### v. **Pembela (*advocate*).**

Sebagai pembela, pekerja sosial bertindak selaku wakil sasaran yang membela kepentingan sasaran.

### vi. **Aktivis (*activist*).**

Sebagai aktivis, pekerja sosial merupakan penggerak bagi masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan.

Berdasarkan kedua pendapat ahli tersebut, pekerja sosial memiliki beberapa peran dalam pengembangan masyarakat. Terdapat perbedaan jumlah peran yang

dikemukakan kedua ahli tersebut, namun pada dasarnya peran-peran tersebut adalah peran yang sama. Sesuai dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya, fasilitator sering dipertukarkan dengan pemungkin (*enabler*). Hal tersebut karena peranan yang dimaksud adalah sama, yaitu membantu klien untuk lebih mudah memenuhi kebutuhannya. Selain itu, peran tenaga ahli dan perencana sosial juga termasuk dalam peran fasilitator atau pemungkin, karena keduanya merupakan peran yang membantu klien untuk lebih mudah memenuhi kebutuhannya. Terakhir peran pekerja sosial sebagai aktivis sebenarnya telah berada di dalam peran pekerja sosial sebagai mediator. Mediator sebagai “fungsi kekuatan ketiga” untuk menjembatani antara anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambat klien memungkinkan pekerja sosial untuk menjadi penggerak bagi masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan melawan hambatan yang terjadi. Oleh karena itu, terdapat 4 peran pekerja sosial dalam pengembangan masyarakat secara umum yakni fasilitator, broker, mediator dan advokat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengembangan Ekonomi Lokal di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung**

Pengembangan ekonomi lokal yang sesuai berdasarkan potensi daerah Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung adalah produksi opak singkong. Berdasarkan 6 komponen utama pengembangan ekonomi lokal (PEL), berikut penjabaran pengembangan ekonomi lokal produk opak singkong di Desa, Sindangpanon, Kecamatan Banjaran:

Kelompok sasaran yang ada adalah pelaku usaha lokal dan pelaku usaha baru, dimana 5 orang adalah pelaku usaha lokal yang sudah lama memproduksi produk dan 1 orang adalah pelaku usaha baru yang baru 3 bulan (September-November) melakukan produksi. Sementara, belum ada investor dari luar karena pemahaman para pelaku usaha lokal mengenai modal, promosi, peningkatan teknologi, manajemen dan kelembagaan dari para pelaku usaha lokal masih perlu ditingkatkan. Kemudian, belum ada informasi prospek bisnis yang bisa disampaikan kepada investor luar baik dari pihak pelaku usaha lokal maupun pemerintah. Dengan demikian, peraturan tentang investasi, hukum, kampanye, keamanan dan pusat pelayanan investasi sendiri belum ada terutama di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Pelaku usaha baru juga belum mendapat perhatian dari pemerintah desa setempat untuk dihubungkan pada kegiatan pelatihan kewirausahaan, pendampingan dan monitoring, hingga percepatan izin. Pelaku usaha lokal sendiri memerlukan hal yang sama seperti pelaku usaha baru, karena selama ini semua kegiatan mulai dari produksi hingga pemasaran yang dilakukan masih berdasarkan pemahaman masing-masing individu dan cukup minim. Hal tersebut bukan karena pelaku usaha yang tidak mau

meningkatkan kapasitasnya, namun para pelaku usaha belum mengetahui bagaimana cara dan akses sumber untuk meningkatkan kapasitasnya.

Akses ke lokasi produksi sudah cukup baik, jalan sudah diperbaiki oleh pemerintah. Hanya saja, diperlukan usaha lebih untuk mencapai tempat produksi karena tempat produksi tidak berada di pinggir jalan. Jika terjadi pengangkutan produk dalam jumlah besar, diperlukan biaya tambahan untuk mengangkutnya. Kemudian, angkutan umum di Desa Sindangpanon yang dapat mengakses daerah Ciparingga hanya ojek dan delman (sado) yang hanya sampai daerah Bojong (terhalang oleh satu daerah/kampung untuk sampai di Ciparingga). Hal tersebut dikarenakan kontur jalan yang terlalu naik dan berupa tanjakan yang mustahil untuk dilewati oleh delman.

Insfrastuktur komunikasi sendiri sudah ada, walau dengan sinyal yang tidak begitu kuat telepon seluler sudah dapat digunakan. Kemudian, air bersih tersedia dengan baik dan setiap pemukiman memiliki sumber air masing-masing berupa sumur gali. Tenaga kerja terampil sudah ada, meski jumlahnya sedikit dan masih memiliki hubungan kekerabatan serta tinggal tidak jauh dari tempat produksi. Sementara, lembaga keuangan lokal informal yang ada adalah rentenir/ bank keliling dan lembaga keuangan formal adalah bank swasta di tingkat kecamatan yang setidaknya berjumlah 5 bank.

Lembaga penelitian dari pihak pemerintah masih berada di tingkat Provinsi, kemudian lembaga penelitian dari pihak universitas juga berada jauh di kota/kabupaten lain. Pelayanan kesehatan yang dimiliki Ciparingga adalah Posyandu dan Puskesmas yang berada ditingkat Kecamatan. Rumah sakit baik daerah maupun rumah sakit swasta berada di kecamatan lain. Lingkungan pemukiman masih terbilang asri, tidak kumuh dan belum tercemar.

Kebijakan yang cukup berpengaruh pada pengembangan ekonomi lokal adalah Perda No. 8 Tahun 2012 Tentang Perizinan Perdagangan serta Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi Dan Non Koperasi) Melalui Perbankan. Kebijakan-kebijakan tersebut berpengaruh khususnya pada modal keuangan dan proses distribusi produk. Sementara itu, berdasarkan Diskukm Provinsi Jabar, salah satu kebijakan yang ingin coba dicapai adalah "Seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Barat memiliki klinik bisnis/inkubator bisnis; Seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Barat memiliki klinik kemasan". Pada kenyataannya, kebijakan tersebut masih belum bisa terwujud.

Kegiatan produksi masih manual sehingga menggunakan SDM yang ada, yaitu para tetangga yang bisa mendukung kegiatan produksi. Penyerapan tenaga kerja tersebut merupakan salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat. Peralatan yang digunakan juga masih tradisional mulai dari pengeringan yang dilakukan dengan cara dijemur menggunakan nampian yang terbuat dari anyaman bambu ataupun ayakan. Untuk

limbah produksi berupa kulit ubi kayu biasanya dijadikan pupuk atau diolah dijadikan pakan ternak.

Kendala seperti cuaca juga mempengaruhi proses produksi, karena opak harus dikeringkan dengan cara dijemur dibawah sinar matahari langsung. Kemudian ada satu hal lagi yang dapat menjadi kendala dalam produksi opak singkong ini, yaitu singkong atau ubi kayu yang telah dipanen tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama bahkan lebih dari satu hari. Ubi kayu harus segera digunakan karena jika disimpan dalam dalam waktu yang lama akan menjadi berubah warna menjadi menghitam dan menjadi tidak baik untuk digunakan dalam produksi opak. Hambatan tersebut dapat dihindari dengan salah satu potensi yang dimiliki oleh masyarakat sekitar yang memiliki kendaraan bermotor. Semua produsen dapat memanfaatkan potensi orang-orang disekitarnya yang dapat dipakai untuk memperoleh bahan baku ubi kayu yang bahkan berada di Kecamatan lain.

Inovasi lebih yang dapat dilakukan oleh produsen opak ubi kayu ini adalah variasi yang lebih banyak lagi dalam rasa. Inovasi dalam produksi lainnya adalah penggunaan teknologi agar ukuran setiap opak sama persis. Salah satu produsen sudah menggunakan teknologi manual (mesin manual pelebar adonan), namun produsen lainnya masih belum. Kemudian, inovasi kemasan yang lebih menarik dan lebih tahan lama juga diperlukan karena pengemasan yang dilakukan biasanya dalam kemasan besar dan kemasan kecil tanpa label. Penggunaan brand juga masih belum diterapkan oleh semua produsen, dimana penggunaan *brand*/merek sendiri merupakan salah satu bagian penting dari *marketing*.

Pemasaran yang lebih luas juga dapat dilakukan dengan menggunakan *social media* dan jasa pengiriman barang, namun hal tersebut belum dilakukan oleh para produsen. Untuk pemasaran sendiri juga dapat memunculkan *stakeholder* lain yang khusus berperan dalam membantu proses pemasaran dari masyarakat sekitar. Beberapa diantaranya dengan menjadi distributor yang memanfaatkan media sosial, menjadi penyedia jasa pengiriman, menjadi distributor (pemilik toko) yang menampung seluruh produk. Dengan demikian, pengembangan usaha lokal ini dapat berdampak baik pada masyarakat sekitar karena potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan.

Untuk tata pemerintahan di tingkat Provinsi sudah sangat baik, melihat sistem, struktur, dan program yang ada. Untuk kerjasama, khususnya promosi juga sudah baik dengan memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang dapat memfasilitasinya. Sayangnya jika turun ke tingkat kabupaten bahkan kecamatan, program-program yang sudah baik belum bisa tersampaikan dan dirasakan oleh seluruh pelaku usaha lokal maupun pelaku usaha baru.

Keberadaan pemerintah belum begitu terasa dalam industri pangan ini, baik dalam proses produksi maupun distribusi atau pemasaran. Pemerintah Desa setempat dapat menjadi salah satu *stakeholder* yang menghubungkan produsen opak singkong dengan berbagai kegiatan

dan program-program dari Dinas Koperasi dan UKM tingkat Kecamatan, Diskoperindag (Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian dan Perdagangan) Kabupaten Bandung, serta Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Barat. Bukan hanya disitu, lembaga keuangan formal juga dapat menjadi salah satu *stakeholder* lainnya. Terdapat sekitar 5 Bank yang berbeda sebagai lembaga keuangan formal yang bisa diakses oleh masyarakat Desa Sindang panon, khususnya produsen opak ubi kayu saat ini. Bank sendiri memiliki salah satu program yang khusus untuk membantu permasalahan peminjman modal, yaitu KUR (Kredit Usaha Rakyat).

*Stakeholder* yang sudah berperan saat ini adalah, para produsen, para petani atau pemilik kebun yang menanam singkong disekitar tempat produksi, para tenaga kerja yang membantu proses produksi, pemilik toko atau pedagang di pasar yang menjual minyak serta bumbu yang dibutuhkan oleh produsen, pemilik toko atau pedagang di pasar yang membantu pemasaran produk (distributor).

Penjabaran di atas memberikan gambaran bahwa sumber-sumber yang tersedia untuk melakukan pengembangan ekonomi lokal sudah tersedia, akan tetapi masyarakat belum dapat terhubung dan mengakses berbagai sumber tersebut. Bila dikaitkan dengan peran pekerjaan sosial dalam pengembangan masyarakat, pada kasus ini pekerja sosial berperan sebagai *broker*. Hal tersebut karena disini pekerja sosial hanya perlu menghubungkan klien dengan sumber-sumber yang dapat membantu pengembangan ekonomi lokal.

### SIMPULAN

Pengembangan ekonomi lokal yang dilakukan di Kecamatan Banjaran dapat memanfaatkan potensi hasil produksi komoditas ubi kayu di Kabupaten Bandung.

Pengembangan ekonomi local dengan cara memanfaatkan potensi yang ada menjadiproduk local yang khas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang bersangkutan. Potensi local yang dikembangkan tersebut harus mempunyai nilai ekonomi tinggi sehingga jika dikembangkan menjadi nilai lebih bagi masyarakat yang bersangkutan.

Kecamatan Banjaran dengan segala potensinya telah berhasil mengembangn ekonomi local dengan opak ubinya. Secara engembangan ekonomi local berdasarkan heksagonal terlihat semua ada di Kecamatan Banjaran

walaupun dengan berbagai keterbatasan. Hal ini tidak menjadi halangan karena dapat berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

### DAFTAR PUSTAKA

- Suharto, Edi. 2010. [www.policy.hu/suharto/modul-a/makindo\\_34.htm](http://www.policy.hu/suharto/modul-a/makindo_34.htm) dikutip pada Selasa, 22 November 2016 pukul 00.33 wib.
- <http://www.bandungkab.go.id/arsip/2093/informasi-publik-dinas-koperasi,-ukm,-perindustrian-dan-perdagangan#sthash.J2njLtqQ.dpuf> diakses pada 20 Desember 2016 pukul 22.01 wib
- Neni. 2013. <http://mahaneni.blogspot.co.id/2013/09/peran-pekerja-sosial-dalam-pengembangan.html> dikutip pada 21 November 2016 pukul 23.48 wib.
- United Nations Human Settlements Programme. 2005. *The Local Economic Development Series, Promoting Local Development through Strategic Planning Volume 3: Toolkit*. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT).
- Indratno, I. & Agustina. I. H. 2005. Studi Kemampuan Masyarakat Dalam Pengembangan Eko-nomi Lokal Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan, 21(3): 416-429.
- Dendi, A.H.R. & Mahman, R. 2007. Forum Pengembangan Ekonomi Lokal-konsep, Strategi dan Metode; Perspektif dan Pengalaman Nusa Tenggara. GTZ-GLG dan Departemen Dalam Negeri Indonesia.
- Blakely & Bradshaw. 2002. *Planning Local Economic Development, Theory and Practice*. California: Sage Publication.
- Martati, Indah.Suminto danSyarifuddin, Andi. 2013. Model Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Pada Kecamatan Samarinda Ilir. Samarinda: Manajemen Pemasaran, Politeknik Negeri Samarinda. JMK, VOL. 15, NO. 2, September 2013, 123-130 ISSN 1411-1438